

**KINERJA PENGELOLAAN BELANJA
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PONTIANAK PADA ERA OTONOMI DAERAH
TAHUN 2007 – 2011**

ZAHRAWANI

Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura
Pontianak 2013

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of expenditure management and growth of the city government spending on regional autonomy. Each region in the implementation of regional autonomy, autonomy required to be able to run as well as possible and in demand to make changes, one change that should be run in the era of regional autonomy, namely changes in budget preparation. Budget and Expenditure (Budget) compiled with the performance approach.

The method used in this research is descriptive method which is a method that aims to describe the study or description of something that is researched suitable for what happens on the field. Thought process in this study is prepared on the basis of empirical and deductive thinking. This research uses time series data (time series) for 5 years (2007 s / d 2011). Source of data used are secondary data.

Results of this study indicate that the management of Pontianak City Government expenditure has been very good, in terms of spending growth over the 5-year budget from the year 2007 to 2011, the city of Pontianak always increase either the total expenditure budget planning and expenditure.

Keywords : Expenditure Performance

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier, 1995:7) dalam Kuncoro (2006:17). Pembangunan yang dipusatkan dan tidak merata menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang tidak terwujud dan meningkatkan kesenjangan sosial. Atas dasar tersebut pemerintah pusat merubah sistem pemerintahan sentral menjadi desentralisasi yang diwujudkan dengan otonomi daerah.

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mulai menerapkan sistem pemerintahan otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, dengan merujuk pada

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan pelaku ekonomi dalam mengelola keuangan di daerahnya masing-masing. Sistem otonomi daerah menerapkan perubahan-perubahan dalam memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja merupakan penyempurnaan anggaran tradisional. Karakteristik anggaran tradisional sangat berorientasi pada *input* dengan menggunakan pendekatan *incremental* (menetapkan anggaran dengan menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran periode yang lalu atau pada anggaran yang sedang berjalan) dan keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuannya dalam menyerap anggaran.

1.2 Permasalahan dan Tujuan

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kinerja Pengelolaan Belanja Pemerintah Kota Pontianak di Era Otonomi Daerah Tahun 2007 - 2011
- b. Bagaimana Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Pontianak di Era Otonomi Daerah Tahun 2007 – 2011

1.2.2 Tujuan

- a. Untuk Menganalisis Kinerja Pengelolaan Belanja Pemerintah Kota Pontianak di Era Otonomi Daerah.
- b. Untuk menganalisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Pontianak di Era Otonomi Daerah.

1.3 Metode

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui kinerja pengelolaan anggaran pada pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Pontianak. Oleh sebab itu, metode penelitian yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Sebagaimana dikatakan Indriantoro (1999 : 26) bahwa metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang sesuatu yang diteliti sesuai apa adanya yang terjadi dilapangan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007 – 2011, merupakan realisasi penggunaan anggaran yang telah melewati tahap perubahan setiap tahunnya dan di publikasikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Walikota Pontianak setiap

tahunnya. Hal tersebut menjadikan data yang dipergunakan layak sebagai data penelitian.

2.1 Hasil

Dalam melakukan analisis ini, peneliti mengumpulkan data Pendapatan Daerah yang terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan yang Sah serta data Belanja Daerah yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari tahun 2007 – 2011.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Pengukuran Tingkat Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis atau kehematan adalah pengukuran tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau untuk memperoleh sesuatu. Untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari seberapa besar persentase tingkat pencapaian.

Untuk mengukur tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan Pemerintah Kota Pontianak dapat kita lihat melalui persentase tingkat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran tahun 2007 – 2011 yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tingkat Ekonomis Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2007 – 2011

TAHUN	JUMLAH BELANJA		TINGKAT EKONOMIS (%)
	ANGGARAN	REALISASI	
2007	Rp 585,867,289,501.08	Rp 537,263,364,221.66	91.70
2008	Rp 601,608,825,359.67	Rp 446,803,437,670.00	72.27
2009	Rp 720,378,810,826.87	Rp 658,842,306,673.92	91.46
2010	Rp 826,258,381,426.96	Rp 752,867,063,169.12	91.12
2011	Rp 965,283,440,932.30	Rp 891,672,005,596.75	92.37

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.1 dapat kita lihat Selama tahun anggaran 2007 – 2011, hasil dari pembagian realisasi pengeluaran dibagi dengan anggaran pengeluaran dikali 100 % tidak pernah menunjukkan hasil 100 % atau diatas 100 %, ini berarti dapat kita simpulkan selama 5 tahun anggaran perbandingan anggaran dan realisasi anggaran selalu bersifat ekonomis, pos – pos setiap tahun selama 5 tahun anggaran juga menunjukkan sifat ekonomis, kecuali pos belanja hibah pada tahun 2007 yang menunjukkan sifat ekonomis berimbang.

Hal ini membuktikan bahwa selama 5 tahun anggaran 2007 – 2011 pemerintah Kota Pontianak telah menjalankan dengan baik sistem ekonomis yang berhasil menghemat tingkat pengeluaran yang digunakan tanpa adanya prinsip menghabiskan anggaran untuk melaksanakan suatu kegiatan.

2.2.2 Pengukuran Tingkat Efisien

Selain mengukur tingkat ekonomis, pemerintah juga harus mengukur tingkat efisiensi untuk melihat hasil capaian yang optimal dengan biaya yang minimal. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan daerah yaitu dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja kota Pontianak tahun anggaran 2007 – 2011 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Efisiensi Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2007 – 2011

TAHUN	PENDAPATAN	BELANJA DAERAH	TINGKAT EFISIENSI (%)
2007	Rp 556,515,008,922.17	Rp 537,263,364,221.66	96.54
2008	Rp 618,689,345,052.53	Rp 446,803,437,670.00	72.22
2009	Rp 665,671,753,928.90	Rp 658,842,306,673.92	98.97
2010	Rp 765,700,088,192.17	Rp 752,867,063,169.12	98.32
2011	Rp 920,727,224,217.34	Rp 891,672,005,596.75	96.84

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.2 dapat kita lihat hasil dari pembagian realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan yang diasumsikan sebagai belanja daerah dengan realisasi pendapatan dikali 100 % pada tahun 2007 bernilai 96,54 %, pada tahun 2008 bernilai 72,22 %, pada tahun 2009 bernilai 98,97 %, pada tahun 2010 bernilai 98,32 % dan tahun 2011 bernilai 96,84 %, hal ini berarti selama 5 tahun anggaran pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2007 – 2011 menunjukkan sifat efisien karena bernilai dibawah 100 %.

Namun dapat kita lihat pada tahun 2008 terjadi penurunan persentase yaitu sebesar 72,22 %, hal ini disebabkan oleh adanya transisi perubahan kepemimpinan pada tahun 2008 sehingga pencapaian nilai persentase menurun, walaupun nilai persentase pada tahun 2008 menurun, namun tetap tergolong efisien karena memenuhi kriteria dibawah 100 %.

2.2.3 Pengukuran Tingkat Efektivitas

Pengukuran Efektivitas adalah ukuran keberhasilan untuk mencapai target yang ditetapkan. Untuk melihat tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaian pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2007 – 2011 yang dapat kita lihat pada tabel 2.3 sampai tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perbandingan Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007

JENIS PENERIMAAN / PENGELUARAN	RANCANGAN PENERIMAAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah			
Pajak Daerah	Rp 30,486,233,036.00	Rp 31,080,060,400.32	101.95
Pajak Hotel	Rp 3,257,000,000.00	Rp 3,489,272,565.26	107.13
Pajak Restoran	Rp 5,589,250,000.00	Rp 6,319,923,682.00	113.07
Pajak Hiburan	Rp 2,042,500,000.00	Rp 2,128,082,630.00	102.19
Pajak Reklame	Rp 2,648,500,000.00	Rp 3,269,943,046.00	123.46
Pajak Penerangan Jalan	Rp 16,228,983,036.00	Rp 15,142,574,250.00	93.31
Pajak Parkir	Rp 500,000,000.00	Rp 524,572,950.00	102.41
Tunggakan Pajak	Rp 200,000,000.00	Rp 169,054,993.00	82.53
Denda Pajak	Rp 20,000,000.00	Rp 36,636,284.06	183.18
Retribusi Daerah	Rp 18,980,403,150.00	Rp 14,387,142,531.00	75.80
Retribusi Jasa Umum	Rp 8,103,060,750.00	Rp 6,244,260,177.00	77.06
Retribusi Jasa Usaha	Rp 6,342,217,400.00	Rp 3,454,210,674.00	52.46
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 4,535,125,000.00	Rp 4,688,671,680.00	103.39
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 1,438,000,000.00	Rp 1,438,803,730.40	100.06
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	Rp 1,438,000,000.00	Rp 1,438,803,730.40	100.06
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 16,042,292,900.00	Rp 10,967,962,972.45	68.37
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rp 5,842,850,000.00	Rp 364,731,525.00	6.24
Penerimaan Jasa Giro	Rp 1,900,000,000.00	Rp 1,844,791,497.78	97.09
Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 60,000,000.00	Rp 27,650,000.00	46.08
Penerimaan Lain-Lain	Rp 8,239,442,900.00	Rp 8,730,789,949.67	105.96
Penerimaan Daerah	Rp 66,946,929,086.00	Rp 57,873,969,632.17	86.45

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.3 dapat kita lihat pos – pos yang bersifat efektif, yaitu pajak daerah yang bernilai 101,95 % dengan uraian efektivitas tertinggi terjadi pada denda pajak dengan nilai 183,18 % hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak pada tahun-tahun sebelumnya dan efektivitas terendah terjadi pada pajak hiburan dengan nilai 104,19 % yang membuktikan bahwa masyarakat Kota Pontianak menyenangi hiburan. Sedangkan yang bersifat tidak efektif terjadi pada pajak penerangan jalan yaitu 93,31 % dan tunggakan pajak sebesar 84,53 %.

Selanjutnya untuk melihat efektivitas tahun anggaran 2008 dapat kita lihat pada tabel 2.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008

JENIS PENERIMAAN / PENGELUARAN	RANCANGAN PENERIMAAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah			
Pajak Daerah	Rp 34,870,375,000.00	Rp 35,970,187,660.00	103.15
Pajak Hotel	Rp 4,017,000,000.00	Rp 4,245,434,085.00	105.69
Pajak Restoran	Rp 6,307,400,000.00	Rp 8,163,201,716.00	129.42
Pajak Hiburan	Rp 2,390,000,000.00	Rp 2,371,314,593.00	99.22
Pajak Reklame	Rp 3,600,000,000.00	Rp 3,797,737,625.00	105.49
Pajak Penerangan Jalan	Rp 17,790,975,000.00	Rp 16,391,601,040.00	92.8
Pajak Parkir	Rp 500,000,000.00	Rp 726,899,180.00	145.38
Tunggakan Pajak	Rp 225,000,000.00	Rp 226,406,530.00	100.63
Denda Pajak	Rp 40,000,000.00	Rp 47,592,891.00	118.98
Retribusi Daerah	Rp 19,922,166,400.00	Rp 17,841,354,683.00	89.56
Retribusi Jasa Umum	Rp 7,917,788,000.00	Rp 6,445,440,941.00	81.40
Retribusi Jasa Usaha	Rp 7,304,712,400.00	Rp 6,119,882,782.00	83.78
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 4,699,666,000.00	Rp 5,276,030,960.00	112.26
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 1,587,000,000.00	Rp 1,439,457,292.45	90.70
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	Rp 1,587,000,000.00	Rp 1,439,457,292.45	90.70
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 19,215,425,107.00	Rp 8,956,343,342.58	46.61
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rp 12,361,775,000.00	Rp 5,152,088,250.00	41.68
Penerimaan Jasa Giro	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,888,744,136.70	92.44
Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 60,000,000.00	Rp 31,850,000.00	53.08
Penerimaan Lain-Lain	Rp 4,793,650,107.00	Rp 1,883,660,957.88	39.29
Penerimaan Daerah	Rp 75,594,966,507.00	Rp 64,207,342,982.53	82.44

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.4 dapat kita lihat pos – pos yang bersifat efektif, yaitu pajak daerah yang bernilai 103,15 % dengan uraian efektivitas tertinggi terjadi pada pajak parkir dengan nilai 145,38 % , hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan kendaraan yang meningkat dikarenakan pengajuan kredit kendaraan yang dapat dijangkau masyarakat dengan uang muka yang rendah. Efektivitas terendah terjadi pada tunggakan pajak dengan nilai 100,63 %. Sedangkan yang bersifat tidak efektif terjadi pada pajak hiburan yaitu 99,22 % dan pajak penerangan jalan sebesar 92,13 %.

Selanjutnya untuk melihat efektivitas tahun anggaran 2009 dapat kita lihat pada tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009

JENIS PENERIMAAN / PENGELUARAN	RANCANGAN PENERIMAAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah			
Pajak Daerah	Rp 41,738,000,000.00	Rp 43,504,173,896.00	102.23
Pajak Hotel	Rp 5,120,000,000.00	Rp 5,173,647,587.00	101.05
Pajak Restoran	Rp 8,705,000,000.00	Rp 9,711,892,375.00	111.57
Pajak Hiburan	Rp 3,072,025,000.00	Rp 3,089,426,889.00	100.57
Pajak Reklame	Rp 4,125,000,000.00	Rp 4,775,296,223.00	115.76
Pajak Penerangan Jalan	Rp 19,465,975,000.00	Rp 19,523,375,132.00	100.29
Pajak Parkir	Rp 700,000,000.00	Rp 705,050,740.00	100.72
Tunggakan Pajak	Rp 500,000,000.00	Rp 458,735,388.00	91.75
Denda Pajak	Rp 50,000,000.00	Rp 66,749,562.00	133.50
Retribusi Daerah	Rp 21,202,075,000.00	Rp 16,031,046,850.00	75.61
Retribusi Jasa Umum	Rp 8,895,581,000.00	Rp 6,867,848,415.00	77.21
Retribusi Jasa Usaha	Rp 6,468,119,000.00	Rp 5,848,242,220.00	90.42
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 5,838,375,000.00	Rp 3,314,956,215.00	56.78
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 1,857,000,000.00	Rp 1,848,725,552.52	99.55
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	Rp 1,857,000,000.00	Rp 1,848,725,552.52	99.55
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 8,201,956,634.00	Rp 4,463,781,463.48	52.42
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rp 154,000,000.00	Rp 45,365,000.00	29.46
Penerimaan Jasa Giro	Rp 4,500,000,000.00	Rp 2,652,636,832.57	58.95
Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 90,000,000.00	Rp 41,266,000.00	45.85
Penerimaan Lain-Lain	Rp 3,457,956,634.00	Rp 1,724,513,630.91	49.87
Penerimaan Daerah	Rp 72,999,031,634.00	Rp 65,847,727,764.00	90.20

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.4 dapat kita lihat pos – pos yang bersifat efektif, yaitu pajak daerah yang bernilai 104,23 % dengan uraian efektivitas tertinggi terjadi pada denda pajak dengan nilai 133,50 % dan efektivitas terendah terjadi pada pajak parkir dengan nilai 100,29 %. Sedangkan yang bersifat tidak efektif terjadi pada tunggakan pajak sebesar 91,75 %.

Selanjutnya untuk melihat efektivitas tahun anggaran 2010 dapat kita lihat pada tabel 2.6 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010

JENIS PENERIMAAN / PENGELUARAN	RANCANGAN PENERIMAAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah			
Pajak Daerah	Rp 56,415,000,000.00	Rp 58,769,561,681.00	102.17
Pajak Hotel	Rp 7,300,000,000.00	Rp 7,650,415,781.00	102.30
Pajak Restoran	Rp 14,542,200,000.00	Rp 15,088,696,119.00	103.76
Pajak Hiburan	Rp 3,915,000,000.00	Rp 4,078,788,196.00	102.18
Pajak Reklame	Rp 5,546,200,000.00	Rp 5,871,919,024.00	105.87
Pajak Penerangan Jalan	Rp 23,445,800,000.00	Rp 24,667,467,412.00	105.21
Pajak Parkir	Rp 1,128,600,000.00	Rp 1,023,765,490.00	90.71
Tunggakan Pajak	Rp 462,200,000.00	Rp 294,436,640.00	63.70
Denda Pajak	Rp 75,000,000.00	Rp 94,073,019.00	125.43
Retribusi Daerah	Rp 21,145,436,200.00	Rp 18,305,299,499.00	86.57
Retribusi Jasa Umum	Rp 9,197,536,000.00	Rp 8,846,706,621.00	96.19
Retribusi Jasa Usaha	Rp 6,626,165,200.00	Rp 3,940,310,598.00	59.47
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 5,321,735,000.00	Rp 5,518,282,280.00	103.69
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 2,035,113,702.35	Rp 1,899,421,498.85	93.33
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	Rp 2,035,113,702.35	Rp 1,899,421,498.85	93.33
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 17,000,000,000.00	Rp 8,393,850,532.35	49.38
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rp 9,639,200,000.00	Rp 3,556,329,000.00	36.89
Penerimaan Jasa Giro	Rp 4,500,000,000.00	Rp 3,382,253,456.65	75.16
Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 90,000,000.00	Rp 49,853,000.00	55.39
Penerimaan Lain-Lain	Rp 2,770,800,000.00	Rp 1,405,415,078.20	50.72
Penerimaan Daerah	Rp 96,595,549,902.35	Rp 87,368,133,213.70	90.45

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.6 dapat kita lihat pos – pos yang bersifat efektif, yaitu pajak daerah yang bernilai 104,17 % dengan uraian efektivitas tertinggi terjadi pada denda pajak dengan nilai 125,43 % , sama dengan tahun – tahun sebelumnya bahwa kesadaran wajib pajak masyarakat Kota Pontianak masih rendah sehingga menimbulkan denda pajak yang cukup besar dan efektivitas terendah terjadi pada pajak restoran dengan nilai 103,76 %, hal ini menunjukkan masyarakat Kota Pontianak lebih senang makan diluar daripada memasak dirumah. Sedangkan yang bersifat tidak efektif terjadi pada pajak parkir yaitu 90,71 % dan tunggakan pajak sebesar 63,70 %.

Selanjutnya untuk melihat efektivitas tahun anggaran 2011 dapat kita lihat pada tabel 2.7 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perbandingan Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011

JENIS PENERIMAAN / PENGELUARAN	RANCANGAN PENERIMAAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah			
Pajak Daerah	Rp 104,409,000,000.00	Rp 117,806,409,826.00	112.33
Pajak Hotel	Rp 10,456,000,000.00	Rp 10,615,085,573.00	101.52
Pajak Restoran	Rp 19,459,000,000.00	Rp 19,704,282,923.00	101.26
Pajak Hiburan	Rp 4,128,460,000.00	Rp 4,279,287,214.00	103.65
Pajak Reklame	Rp 5,650,000,000.00	Rp 6,523,130,591.00	115.45
Pajak Penerangan Jalan	Rp 28,250,000,000.00	Rp 29,806,723,306.00	105.51
Pajak Parkir	Rp 1,650,000,000.00	Rp 1,283,287,000.00	77.77
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 1,500,000,000.00	Rp 202,470,000.00	13.50
Tunggakan Pajak	Rp 675,540,000.00	Rp 416,702,437.00	61.68
Denda Pajak	Rp 40,000,000.00	Rp 92,164,793.00	230.41
BPHTB	Rp 32,600,000,000.00	Rp 44,883,275,989.00	137.68
Retribusi Daerah	Rp 26,838,924,945.00	Rp 23,940,468,459.00	89.20
Retribusi Jasa Umum	Rp 13,934,993,000.00	Rp 12,285,103,250.00	88.16
Retribusi Jasa Usaha	Rp 6,480,899,645.00	Rp 3,940,820,135.00	60.81
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 6,423,032,300.00	Rp 7,714,545,074.00	120.11
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 2,237,062,638.17	Rp 2,056,428,426.17	91.93
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	Rp 2,237,062,638.17	Rp 2,056,428,426.17	91.93
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 8,332,184,650.00	Rp 7,336,114,567.77	88.05
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rp 2,790,850,000.00	Rp 525,897,000.00	18.84
Penerimaan Jasa Giro	Rp 2,750,000,000.00	Rp 4,799,415,031.22	172.52
Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 100,000,000.00	Rp 12,750,000.00	12.25
Penerimaan Lain-Lain	Rp 2,691,334,650.00	Rp 1,998,052,536.55	72.24
Penerimaan Daerah	Rp 141,817,172,233.17	Rp 151,139,421,278.94	106.57

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.7 dapat kita lihat pos – pos yang bersifat efektif, yaitu pajak daerah yang bernilai 112,83 % dengan uraian efektivitas tertinggi terjadi pada denda pajak dengan nilai 230,41 % dan efektivitas terendah terjadi pada pajak restoran dengan nilai 101,26 %. Sedangkan yang bersifat tidak efektif terjadi pada pajak parkir yaitu 77,77 %, pajak sarang burung wallet yaitu 13,50 dan tunggakan pajak sebesar 61,68 %.

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2007 – 2011 dapat kita lihat pemerintah mencoba meningkatkan efektivitas kota Pontianak, dapat kita lihat persentase tahun 2008 – 2010 selalu mengalami peningkatan, walaupun

persentase yang dicapai tersebut belum dapat mengklasifikasikan pemerintah kota Pontianak pada tingkat efektif, namun peningkatan tersebut terus berlanjut sehingga pada tahun 2011 mencapai persentase 106,57 % yang merupakan termasuk dalam katagori efektif karena bernilai diatas 100 %.

2.2.4 Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Pontianak

Pertumbuhan Belanja harus selalu ditingkatkan, tentunya hal ini harus didasari dengan kebutuhan pemerintah Kota Pontianak yang merupakan kebutuhan tiap- tiap SKPD di Kota Pontianak. Untuk melihat pertumbuhan belanja, dapat kita lihat pada tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8

**Analisis Pertumbuhan Total Belanja dan Pertumbuhan Realisasi Belanja
Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007 - 2011**

TAHUN	TOTAL BELANJA	PERTUMBUHAN TB (%)	REALISASI BELANJA	PERTUMBUHAN RB (%)
2007	Rp 585,867,289,501.08	-	Rp 537,263,364,221.66	-
2008	Rp 601,608,825,359.67	2.19	Rp 446,803,437,670.00	-16.84
2009	Rp 720,378,810,826.87	19.74	Rp 658,842,306,673.92	47.46
2010	Rp 826,258,381,426.96	12.20	Rp 752,867,063,169.12	12.27
2011	Rp 965,283,440,932.30	16.83	Rp 891,672,005,596.75	18.44

Sumber : BPKAD Kota Pontianak, 2012 (data diolah)

Pada tabel 2.8 dapat dilihat total belanja mengalami peningkatan pertumbuhan setiap tahunnya, peningkatan pertumbuhan yang signifikan terlihat pada tahun 2009 sebesar 19,74 % dan peningkatan pertumbuhan yang kecil terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 2,69 %. Hal yang sama terjadi pada realisasi belanja yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2009 yaitu sebesar 47,46 % dengan selisih realisasi belanja sebesar Rp 212.038.869.003,92. Realisasi Belanja yang menunjukkan nilai persentasenya sangat rendah terjadi pada tahun 2008 dimana pada tahun 2008 terjadi transisi kepemimpinan Kota Pontianak sehingga target-target rencana kegiatan banyak yang tidak tercapai. Tingkat pertumbuhan belanja kota Pontianak selama 3 tahun anggaran 2009 – 2011 terlihat cukup baik karena meningkat diatas 10% dari tahun ke tahun.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan belanja Pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2007 – 2011 sudah sangat baik, dimana pengukuran tingkat ekonomis selama 5 tahun anggaran bernilai dibawah 100 % yang berarti ekonomis, pengukuran tingkat efisien selama 5 tahun anggaran bernilai dibawah 100 % yang berarti efisien dan pengukuran tingkat efektivitas pada tahun 2007 – 2010 bernilai dibawah 100 % yang berarti tidak efektif namun pada tahun 2011 pemerintah Kota Pontianak berhasil memperbaiki tingkat efektivitas yang bernilai diatas 100 yang berarti efektif.

2. Selama 5 tahun anggaran dari tahun 2007 – 2011 pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Pontianak selalu mengalami peningkatan baik pada perencanaan anggaran total belanja maupun realisasi belanja, hal ini membuktikan pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kota Pontianak sudah baik, terkecuali pada tahun 2008 yang mengalami penurunan persentase pada realisasi belanja yang disebabkan oleh mekanisme pencairan dana yang tidak memperhatikan waktu pengerjaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana.
3. Secara teoritis hasil penelitian ini memperkuat teori smith (1996) dalam mahsun (2009 : 184) tentang pengukuran kinerja dimana pengukuran outcome memiliki 2 peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.
4. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2011, dimana semua indikator menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, baik dilihat dari sisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas maupun pertumbuhan.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pontianak dapat mempertahankan tingkat ekonomis dan efisien serta meningkatkan tingkat efektivitas Kota Pontianak dengan cara terus meningkatkan realisasi belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
2. Pemerintah Kota Pontianak dapat merancang anggaran belanja dengan memperhatikan mekanisme pencairan dana dan waktu pengerjaan kegiatan yang lebih terfokus untuk kepentingan publik yang dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan anggaran.
3. Pemerintah Kota Pontianak dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan merujuk pada penilaian kinerja masa lalu sehingga kedepannya kinerja dimasa yang akan datang menjadi lebih baik.
4. Pemerintah Kota Pontianak dapat terus meningkatkan kinerjanya yang sudah baik pada tahun 2011 dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah Kota Pontianak sehingga persentase penilaian yang dilihat dari ekonomis, efisien dan efektivitas maupun pertumbuhan dapat menunjukkan hasil yang lebih baik lagi di tahun selanjutnya.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut dengan membandingkan belanja sebelum otonomi daerah atau menambah kurun waktu analisis yang lebih panjang sehingga dapat menyempurnakan penelitian – penelitian selanjutnya.